

Judul : Sudah diangkat & dapat SK: DPR cium ada skandal PPPK siluman
Tanggal : Kamis, 27 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Sudah Diangkat & Dapat SK

DPR Cium Ada Skandal PPPK Siluman

Permasalahan rekrutmen dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di berbagai daerah kerap bermasalah. Terbaru, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karyasuda menemukan adanya PPPK "siluman" alias fiktif. Berdasarkan temuan di lapangan, PPPK tersebut bahkan sudah mendapat Surat Keputusan (SK) sebagai bukti pengangkatan, tapi fiktif.

"Kami menemukan fakta beberapa PPPK yang sudah di-SK-tanya, ternyata datanya

fiktif atau siluman," kata Rifqinizamy dalam rapat kerja bersama KemenPANRB hingga Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Atas peristiwa ini, sejumlah DPRD tengah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri dan membahas mengenai penemuan PPPK fiktif. "Di beberapa DPRD sekarang sedang membentuk Pansus terkait dengan hal ini," ujarnya.

Tak hanya itu, Rifqinizamy juga

menerima aduan terkait telatnya pengajuan usulan rekrutmen PPPK oleh Pemda. Akibatnya, pengangkatan calon PPPK di berbagai daerah pun mengalami keterlambatan.

"Begitu kami cek melalui staf kami, terlambat meng-upload-nya. Jadi bukan salahnya BKN, salah kepala daerahnya lambat meng-upload. Kenapa lambat meng-upload," tutur Rifqinizamy.

Keterlambatan ini, kata dia, bukan tanpa alasan. Daerah kedapatan terlalu banyak negosiasi terkait siapa yang

perlu masuk dalam formasi PPPK. "Terlalu banyak negosiasi sosiologis di daerah untuk dimasukkan sebagai calon PPPK Paruh Waktu yang sekarang hadir," tandasnya.

Anggota Komisi II DPR, Ujang Bey mengatakan Komisi II akan membahas berbagai masukan dan keluhan terkait dengan PPPK fiktif di beberapa daerah. "Kita akan membahasnya," kata dia.

Ia juga berharap agar kasus ini menjadi perhatian bersama agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. "Harus dilakukan

pendataan yang ketat agar ke depan tidak terulang," katanya.

Sementara, Mantan Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Rudiarto Sumarwono menduga kasus PPPK itu karena kesengajaan dari Pemda.

"Menurut saya, penyebabnya lebih condong ke kesengajaan atau manipulasi data daripada sekadar human error," ujar dia.

Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Rudiarto Sumarwono dan Ujang Bey terkait PPPK fiktif, berikut wawancaranya.

RUDIARTO SUMARWONO, Mantan Komisioner KASN

Diduga Memang Ada Unsur Kesengajaan



“

Betul-betul harus didalami, pada level apa permasalahan tersebut terjadi, apa penyebabnya dan bukti-buktinya.

Komisi II DPR menemukan ada pengangkatan PPPK fiktif. Apakah itu human error atau disengaja? Beberapa waktu yang lalu telah terjadi kasus PPPK fiktif atau siluman di beberapa tempat seperti di Enrekang, Dompu dan lain-lain. Menurut saya, penyebabnya lebih condong ke kesengajaan atau manipulasi data daripada sekadar human error.

Ditemukan 64 PPPK yang mendaf-tar menggunakan SK honorer fiktif agar memenuhi syarat masa kerja. BKN juga menyatakan bahwa ada PPPK fiktif yaitu honorer yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi tetap diangkat menjadi PPPK. Dengan fakta-fakta tersebut, dugaan manipulasi administratif, "salah input" data, atau pembuatan dokumen palsu tampak sistematis dan disengaja, bukan hanya

kesalahan teknis acak atau human error.

Pihak mana yang perlu diper-salahkan atas kejadian ini?

Menurut saya kita harus mema-hami dulu mekanisme dan PIC yang terkait dalam proses pengangkatan PPPK fiktif atau siluman.

Berdasarkan kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah, ada beberapa tahapan dalam proses PPPK, yaitu: 1. Pegawai yang menginput-mengusulkan nama (operator BKPSDM/ admin sistem). 2. Pimpinan OPD atau pejabat yang mengeluarkan SK hono-rer fiktif. 3. Tim verifikasi internal (OPD/BKPSDM). 4. Tim pencatatan NIP PPPK atau tim penandatanganan SK PPPK.

Harus didalami di mana perma-

salahannya, ya?

Betul-betul harus didalami, pada level apa permasalahan tersebut terjadi, apa penyebabnya dan bukti-buktinya.

Dengan pendalaman-pendalaman secara komprehensif dan terpadu, maka kita bisa memetakan dengan lebih tepat persoalan, pelanggaran yang terjadi. Karena disetiap daerah, pokok perma-salahan bisa terjadi di level yang berbeda dan mungkin saja melibatkan beberapa level sebagaimana saya sebutkan di atas.

Ke depan, apa yang mesti diperbaiki?

Betul sekali, dibanding mencari kesalahan-kesalahan, yang tentu tetap perlu ditindaklanjuti dan diselesaikan secara regulasi dan hukum, maka hal yang tidak kalah penting adalah agar ke depan yang perlu diperbaiki agar ke depan tidak terjadi lagi. ■ REN

UJANG BEY, Anggota Komisi II DPR

Sumber Data PPPK Berasal Dari Pemda

“

Kami mendesak kepada BKN harus segera memverifikasi, mengecek, dan audit data PPPK sampai seluruh kabupaten kota.

Apa pendapat dan pandangan Anda terkait pengangkatan PPPK fiktif yang terjadi di beberapa daerah?

Sebenarnya data PPPK fiktif itu harus dilihat dari sisi hulu ke hilir. Selama ini, PPPK itu kan sumber datanya dari kabupaten kota yang melakukan pendataan-pendataan. Tapi memang pada saat pendataan itu ada sedikit muatan politis juga kan.

Ada muatan politis seperti apa?

Misalkan ada anaknya tim sukses, atau saudaranya bupati atau pejabat daerah yang dimasukkan ke PPPK, walaupun belum memenuhi syarat, tapi diluluskan.

Pihak mana yang patut diper-salahkan?

Memang, sumber data PPPK itu berasal dari Pemda, tetapi BKN juga jangan lepas tangan. BKN seharusnya benar-benar memverifikasi secara benar data-data dari daerah.

BKN juga harus mengecek ke-benarannya seperti apa, itu kan salah satunya tugas dari BKN juga.

Selanjutnya, BKN juga memas-kan bahwa data dari daerah benar dan sesuai dengan fakta yang ter-jadi, sehingga nanti bisa menges-timasi, mengkalulasi benar data-data real.

Apa pesan Anda dengan adanya kasus ini?

Harus segera dituntaskan secepat mungkin, karena hal ini bisa menjadi presiden buruk buat ke depannya. Saya sebagai anggota Komisi II

DPR mendesak kepada BKN harus segera memverifikasi, mengecek, dan audit data PPPK sampai seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia.

Tujuannya untuk memastikan data PPPK itu benar-benar sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Jadi biar nanti ke depan kalau ada permasalah-an pendataan tidak saling melampar tanggung jawab.

Yang tidak kalah penting adalah harus dilakukan pendataan yang ketat agar ke depan tidak terulang.

Jika kasus ini tidak menjadi per-hatian di daerah bisa menciptakan keceburuan di daerah-daerah tertentu. Misalkan ada orang udah lama tapi belum diangkat PPPK, sementara baru langsung diangkat PPPK. ■ REN

